

# Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Chairani Adelina<sup>1</sup>, Meirani Betriana<sup>2</sup>

Universitas Prabumulih -<sup>1</sup>chairaniadelina@unpra.ac.id

-<sup>2</sup>meiranibetriana@unpra.ac.id

**Abstract**— This research aims to determine the effect of regional taxes and regional levies on the financial independence of regional governments in South Sumatra Province. This research uses a quantitative approach and quantitative data types with secondary data sources obtained from the LKPD of the Regional Government of South Sumatra Province for 2020 - 2022. The data was processed using the SPSS application and analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this research show that regional taxes have an influence on regional financial independence with a significance value of  $0.00 < 0.05$ , while regional levies do not have a significant influence on regional financial independence with a value of  $0.176 > 0.05$ . However, regional taxes and regional levies simultaneously influence regional financial independence with a significance value of  $0.00 < 0.05$  and with a coefficient of determination of 0.899.

**Keywords:** Regional Taxes, Regional Levies, Regional Financial Independence

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945 adalah “memajukan kesejahteraan umum” yang artinya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembangunan diberbagai bidang baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban atas daerah otonom yang dimilikinya dalam mengawasi serta mengontrol kepentingan masyarakat serta urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah berhak memanfaatkan serta menggunakan sumber pendapatan daerahnya sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi pendapatannya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan potensi daerah (Adelina *et.al*, 2021).

Menurut Halim (2018), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri melalui pendapatan asli daerah yang diperoleh. Gambaran Kemandirian Keuangan Daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya (Kamaroellah, 2017).

Kemandirian ada beberapa faktor yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah salah satunya bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan menurut Nasir (2019) PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peluang yang baik untuk ditingkatkan karena akan menciptakan kemandirian bagi pemerintah daerah dalam memenuhi sumber pendapatannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan profesional dan transparan demi mengoptimalkan dan meningkatkan PAD.

Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau

Sumatera. Ibukota Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada akhir tahun 2023 penduduk provinsi ini berjumlah 8.889.913 jiwa. Dari hasil pengamatan yang dilakukan rasio kemandirian daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada gambar berikut :



**Gambar 1 : Grafik Rasio Kemandirian Daerah**

Dari gambar diatas terlihat rasio kemandirian daerah terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 36,38%, kemudian pada tahun 2021 sebesar 40,22%, tahun 2022 sebesar 49,43% dan pada tahun 2023 sebesar 52,69%. Meningkatnya rasio ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah baik berupa pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, maupun pendapatan lain yang sah.

## 2. METODE PENELITIAN

Demi mencapai tujuan analisis statistik pada data numerik, penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif memanfaatkan data yang dapat diukur untuk secara objektif memeriksa dan membandingkan berbagai elemen. Dengan menggunakan statistik, peneliti dapat menguji hipotesis, menemukan pola, dan menarik kesimpulan dari data empiris. Hasil temuan ini lebih dapat diandalkan dan valid karena mengurangi bias interpretasi subjektif yang mungkin timbul dari pendekatan ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di dapat dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2022. Adapun model penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda dengan model analisis regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

maka

$$KKD = \alpha + \beta_1 Tax + \beta_2 Ret + \varepsilon$$

Dimana :

KKD : Kemandirian Keuangan Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  : Koefisien Regresi

Tax : Pajak Daerah

Ret : Retribusi Daerah

$\varepsilon$  : Error term

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalh uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokesdatisitas dan uji auto korelasi. Sedangkan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji parsial, uji simultan dan uji koefisien determinasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Asumsi Klasik

Sugiyono (2020) menyatakan bahwa uji asumsi klasik merupakan serangkaian evaluasi yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa data dalam analisis regresi memenuhi sejumlah asumsi dasar yang diperlukan untuk menghasilkan estimasi yang valid dan dapat dipercaya. Berikut ini adalah beberapa uji asumsi klasik yang sering dilakukan dalam analisis regresi:

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah distribusi data dalam suatu kelompok data atau variabel terdistribusi normal atau tidak disebut dengan uji normalitas.

**Tabel 1**

#### Hasil Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.97054500
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.065
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

*Sumber : Data Diolah*

Uji normalitas berguna untuk menentukan apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diatas bahwa nilai Asymp. Sig.(2-tailed) sebesar 0,20 yang artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi secara normal.

##### b. Uji Multikolinearitas

Menurut Sugiyono (2020), uji multikolinearitas menentukan apakah variabel independen dalam model regresi saling terkait. Hasil uji multikolinearitas dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**

#### Hasil Uji Multikolinearitas

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tax	.121	8.273
	Retribution	.121	8.273

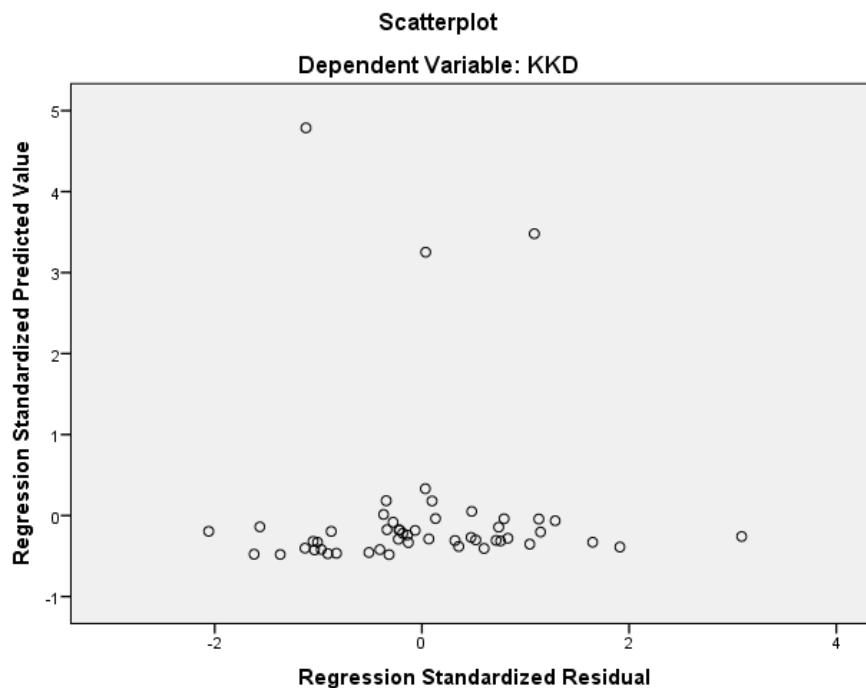
a. Dependent Variable: KKD

*Sumber : Data Diolah*

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas. Hal ini tampak pada nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 10 persen (0,1) yaitu 0,121. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10 yaitu sebesar 8,273. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi tersebut.

##### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksetaraan varians pada residual berbagai observasi dalam model regresi (Sugiyono, 2020). Jika nilai signifikansi (sig) melebihi 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heterokedstisitas**

*Sumber : Data Diolah*

Pada gambar 4.1. diatas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

d. Uji Auto Korelasi

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>	
Durbin-Watson	
Model	
1	.988
a. Predictors: (Constant), Retribution, Tax	
b. Dependent Variable: KKD	

*Sumber : Data Diolah*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan bantuan program SPSS nilai Durbin-Watson sebesar 0,988 dengan sampel 51 dan  $K = 3$  maka  $dL = 1,4273$  dan  $dU = 1,6754$ . Jadi nilai Durbin-Watson dalam penelitian ini sebesar 0,988 lebih kecil dari batas atas 1,697 dengan demikian penelitian ini menunjukan terjadinya autokorelasi positif.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Berikut hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.652	.406		13.917	.000
	Tax	.022	.004	.776	5.891	.000
	Retribution	.133	.097	.181	1.374	.176

a. Dependent Variable: KKD

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.9 diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 5,652 + 0,022X_1 + 0,133X_2 + e$$

atau

$$KKD = 5,652 + 0,022Tax + 0,133Retribution + e$$

Keterangan :

KKD : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tax : Pajak Daerah

Retribution : Retribusi Daerah

E : Error

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau anggapan sementara yang diperoleh dari konseptualisasi masalah. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Tabel 4 di atas, hasil pengujian dengan uji parsial (uji t) untuk setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel Pajak Daerah dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar  $5,891 > 1,675$  dan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$  yang artinya variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kemandirian daerah.
- Variabel Retribusi Daerah dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel sebesar  $1,347 < 1,675$  dan nilai signifikansi  $0,176 > 0,05$  yang artinya variabel retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kemandirian daerah.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Simultan**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1732.339	2	866.169	214.142	.000 <sup>b</sup>
	Residual	194.152	48	4.045		
	Total	1926.491	50			

a. Dependent Variable: KKD

b. Predictors: (Constant), Retribution, Tax

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel kemandirian daerah dengan nilai f hitung lebih besar dari f tabel yaitu  $214,14 > 2,76$  dan dengan nilai signifikansi  $0,00 > 0,05$ .

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.948 <sup>a</sup>	.899	.895	2.01118	.988

a. Predictors: (Constant), Retribution, Tax

b. Dependent Variable: KKD

Sumber : Data Diolah

Nilai yang dipakai dalam penelitian ini adalah nilai Adjusted  $R^2$  karena nilai ini dapat naik atau turun apabila satu variabel bebas ditambahkan ke dalam model yang diuji. Nilai Adjusted  $R^2$  dapat dilihat pada tabel diatas dimana nilai Adjusted  $R^2$  adalah sebesar 0,899. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah dapat menjelaskan variabel kemandirian daerah sebesar 89,9%, sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## Pembahasan

### Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah terlihat bahwa nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel sebesar  $5,891 > 1.675$  dan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$  yang artinya variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnasari and Sunaningsih (2022), Novianti (2022), Dewantoro (2022), Saraswati and Nurharjanti (2021) dan (Novitasari and Novitasari, 2019).

Salah satu faktor yang menunjukkan kemandirian keuangan daerah salah satunya adalah jumlah penerimaan pajak daerah yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pajak daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga daerah tersebut dianggap mampu untuk membiayai pembangunannya sendiri. Selain itu, semakin tinggi partisipasi rakyat dalam membayar pajak daerah akan menggambarkan kesejahteraan rakyat sehingga kemandirian dapat dicapai (Nggilu, Sabijono and Tirayoh, 2021). Melalui pendekatan *Stewardship Theory* pemerintah selaku *steward* bertindak sebagai pengelola sumber daya diharapkan dapat berupaya semaksimal mungkin dalam mensejahterakan masyarakat sebagai *principal* (Lukitawati, 2020). Pemerintah daerah berupaya untuk memaksimalkan pendapatan daerah dan fungsinya melalui pengelolaan pajak daerah yang tepat sasaran serta pendanaannya di sektor produktif yang menguntungkan bagi daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.

### Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah terlihat bahwa nilai  $t$  hitung lebih kecil dari  $t$  tabel sebesar  $1,347 < 1.675$  dan nilai signifikansi  $0,176 > 0,05$  yang artinya variabel retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kemandirian daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Pujiyanti (2023) dan Mardiah *et al.*, (2018).

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah. Jika penerimaan retribusi daerah tinggi maka akan menyebabkan pendapatan asli daerah meningkat sehingga rasio kemandirian keuangan daerah pun meningkat. Namun jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak daerah di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan, jumlah penerimaan retribusi daerah relatif kecil selain itu juga pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih belum memaksimalkan sumber dayanya dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah, seperti penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi pemberian izin tertentu. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap retribusi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah dari objek maupun subjek retribusi daerah yang baru.

### Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel kemandirian daerah dengan nilai  $f$  hitung lebih besar dari  $f$  tabel yaitu  $214,14 > 2,76$  dan dengan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Hal ini sejalan dengan penelitian Novianti (2022), Nggilu, Sabijono and Tirayoh (2021) dan Febriyanti and Faris, (2019).

Selanjutnya nilai Adjusted  $R^2$  karena nilai ini dapat naik atau turun apabila satu variabel bebas ditambahkan ke dalam model yang diuji. Nilai Adjusted  $R^2$  dapat dilihat pada tabel diatas dimana nilai Adjusted  $R^2$  adalah sebesar 0,899. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah dapat menjelaskan variabel kemandirian daerah sebesar 89,9%, sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen pembentuk pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah perlu menggali potensi pendapatan asli daerahnya melalui maksimalisasi potensi pungutan pajak dan retribusi daerah sehingga kemandirian keuangan daerah dapat meningkat. Selain itu, sumber pendapatan asli daerah memberikan peranan penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dalam upaya mensejahterakan rakyat

sehingga dengan pendapatan asli daerah yang tinggi pemerintah daerah dianggap mampu menyelenggarakan pemerintahannya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah (Lukitawati, 2020).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah terlihat bahwa nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel sebesar  $5,891 > 1,675$  dan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Semakin tinggi pajak daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga daerah tersebut dianggap mampu untuk membiayai pembangunannya sendiri.
2. Retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah terlihat bahwa nilai  $t$  hitung lebih kecil dari  $t$  tabel sebesar  $1,347 < 1,675$  dan nilai signifikansi  $0,176 > 0,05$  yang artinya variabel retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kemandirian daerah. Jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak daerah di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan, jumlah penerimaan retribusi daerah relatif kecil selain itu juga pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih belum memaksimalkan sumber dayanya dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah.
3. Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel kemandirian daerah dengan nilai  $f$  hitung lebih besar dari  $f$  tabel yaitu  $214,14 > 2,76$  dan dengan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Nilai Adjusted  $R^2$  dapat dilihat pada tabel diatas dimana nilai Adjusted  $R^2$  adalah sebesar 0,899. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah dapat menjelaskan variabel kemandirian daerah sebesar 89,9%, sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen pembentuk pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah perlu menggali potensi pendapatan asli daerahnya melalui maksimalisasi potensi pungutan pajak dan retribusi daerah sehingga kemandirian keuangan daerah dapat meningkat.

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat memaksimalkan potensi pungutan pajak dan retribusi daerah sehingga kemandirian keuangan daerah dapat meningkat.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah untuk meneliti variabel yang belum ditemukan pengaruhnya atau menggunakan variabel lain seperti belanja operasional, belanja modal dan lainnya. Selain itu menggunakan data yang lebih baru dan lingkup penelitian yang lebih luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, C. et al. (2021). Factor Affecting Disclosure of Financial Statement on Local Governemnt Website in Indonesia. *Eurasia : Economic & Bussiness*, 1 ( 43), January 2021 pp. 128-137.
- Dewantoro, D.A. (2022) 'Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah', *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), pp. 38–47. Available at: <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.174>.
- Febriyanti, F. and Faris, M. (2019) 'Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(2), pp. 162–175.
- Halim, A. & Kusufi, M. S.. (2018). Akuntansi Sektor Publik Salemba Empat : Jakarta.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123-138.
- Lukitawati, L. (2020) 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah', *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(2), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.57084/jata.v1i2.424>
- Mardiah, D.S. et al. (2018) '(8.109 > 2.306). Sedangkan retribusi daerah secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang dengan nilai  $t'$ , (23), pp. 2014–2015.

- Nasir, M.S. (2019) 'Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), p. 30. Available at: <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.
- Nggilu, F., Sabijono, H. and Tirayoh, V. (2021) 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), pp. 623–635.
- Novianti, R., Akuntansi, J. and Bandung, P.N. (2022) 'Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya The Effect of Local Taxes and Regional Levies on Regional Financial Independence in The Government of Tasikmalaya City', *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), pp. 196–206.
- Novitasari, M. and Novitasari, L. (2019) 'Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah', *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), p. 174. Available at: <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244>.
- Pujianti, Erlin. (2023) 'Pengaruh Pajak Derah, Retribusi Daerah, dan Likuiditas Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021'. Skripsi Universitas Widya Dharma Klaten
- Saraswati, N.P. and Nurharjanti, N.N. (2021) 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah', *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, pp. 51–64.
- Trisnasari, R. and Sunaningsih, S.N. (2022) 'Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), p. 18. Available at: <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.